

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan terhambat pada anak di bawah usia 5 tahun yang disebabkan oleh malnutrisi kronis, yang mengakibatkan anak secara signifikan lebih kecil dari yang diharapkan untuk usia mereka. Malnutrisi adalah suatu kondisi yang dipengaruhi oleh seribu hari pertama kehidupan bayi, dan biasanya muncul ketika bayi mencapai usia 2 tahun. Angka kejadian di wilayah Bangkalan secara konsisten meningkat di wilayah Jawa Timur, namun diproyeksikan akan menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Angka kejadian kurang energi protein (KEP) pada tahun 2021 turun menjadi 24,4%. Prevalensi gagal tumbuh pada balita di Jawa Timur adalah 19,2%. Titik fokus yang paling penting pada tahun 2023 adalah kekurangan zat besi. Di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, prevalensi *stunting* tertinggi terjadi pada 85 anak yang kekurangan nutrisi penting untuk pertumbuhan. Dalam daerah kesehatan dikomposisi, kedapatan pengamatan keterlibatan peningkatan perkembangan terpenting berlandaskan keputusan pemeroleh anak usia 1-5 tahun, pemberi yakni (kader ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Sehingga memperoleh melawan *stunting*, asupan nutrisi pada saat sewaktu kala hamil diperlukan, mengkonsumsi obat penambah darah yang cukup bagi wanita hamil semasa kehamilan dan mengkonsumsi susu yang mengandung asam folat, menyusui ASI atas bagian tertentu kurun waktu 6 bulan pertama, akhirnya bertahan dengan MP-ASI MP-ASI Pemberian Makanan Pendamping sesuai sampai anak mencapai usia dua tahun menurut (Wandini et al., 2020). Kebersihan sanitasi hingga wilayah lingkungan, pola pengasuhan anggota, kamar kelahiran, hingga genetika mempengaruhi menurut (Nirmalasari, 2020). Ada atau tidaknya masalah gizi bayi regional tidak jauh dari kontribusi ibu PKK.

Inisiatif masyarakat berfokus pada peningkatan kemampuan keluarga, yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga yang mendorong integrasi sosial. Proses sosialisasi dari sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah desa membina kohesi komunal melalui upaya kolaboratif PKK. Kebutuhan akan interaksi sosial mendorong munculnya gerakan-gerakan masyarakat, dengan PKK berada di garis depan dalam upaya-upaya ini. Para aktivis yang mengadvokasi pemberdayaan keluarga dapat ditemukan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta di dalam asosiasi buruh lainnya. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengubah keluarga

berdasarkan kemampuan intelektual, spiritual, fisik, dan mental anggotanya. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan yang lebih baik. Organisasi nirlaba yang dibentuk oleh anggota komunitas tertentu Melepaskan potensi penuh keluarga melalui pemberdayaan Ada harapan masyarakat bagi perempuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan PKK menawarkan platform untuk memenuhi peran tersebut. Dalam rangka membina gaya hidup bersih dan sehat, sangat penting bagi keluarga untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kebiasaan yang menghilangkan segala bentuk perilaku buruk. Sumber informasi ini adalah Kementerian Kesehatan di Indonesia, khususnya dari tahun 2021. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi keadaan darurat kesehatan, sangat penting untuk mendorong penerapan kebiasaan yang higienis dan sadar kesehatan di dalam rumah tangga. Gerakan PKK mengandalkan banyak kelompok kerja (Pokja) yang berfokus pada berbagai proyek, terutama di sektor kesehatan. Pokja-pokja ini memainkan peran penting dalam keberhasilan gerakan ini, yang didukung oleh 10 inisiatif utama.

Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia berada di peringkat ketiga dalam hal prevalensi di antara negara-negara di regional Asia Tenggara/Southeast Asia Regional (SEAR). Menurut Kementerian Kesehatan (2018), tingkat rata-rata *stunting* di Indonesia antara tahun 2005 dan 2017 adalah 36,4%. Menurut data Pemantauan Status Gizi (PSG) dalam tiga tahun terakhir, *stunting* memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya, seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2018), kejadian *stunting* meningkat dari 27,5% di tahun 2016 menjadi 29,6% di tahun 2017. Prevalensi *stunting* di Jawa Timur pada tahun 2015, yang ditentukan oleh Pemantauan Status Gizi (PSG), adalah 27,1%. Menurut data Bappenas, provinsi Jawa Timur diidentifikasi sebagai lokasi prioritas untuk mengatasi *stunting* selama periode 2018-2019. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka *stunting* menurun dibandingkan tahun 2013, namun masih di atas 30%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatasi kesulitan tersebut dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif dan program konkret yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi masalah *stunting* yang ada. Hal ini terlihat dari dedikasi Wakil Gubernur Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang membuat sebuah panduan yang menguraikan pemanfaatan dana desa untuk prioritas kesehatan. Salah satu tujuannya adalah untuk membatasi penggunaan dana masyarakat hingga maksimal sepuluh persen, dengan tujuan untuk mengurangi prevalensi *stunting* (Novianti, 2018).

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat serius dalam menangani masalah *stunting* yang ada di kabupaten Bangkalan, Hal ini dibuktikan dengan ditetapkan

peraturan Bupati Bangkalan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penurunan *stunting* yang menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan sebagai dasar dalam mentidaklanjuti masaah *stunting* di Kabupaten Bangkalan dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berharap program penurunan *stunting* disana dapat berkurang.

Pemerintah telah menerapkan strategi komprehensif yang terdiri dari lima pilar untuk mengatasi masalah *stunting*. Pilar-pilar ini meliputi: (1) mendapatkan komitmen dari para pemimpin untuk memprioritaskan masalah ini, (2) melakukan kampanye nasional dan memanfaatkan komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran, (3) memastikan koordinasi dan konsolidasi program di tingkat pusat, daerah, dan desa, (4) berfokus pada gizi dan ketahanan pangan, dan (5) membangun sistem untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan. Selain itu, ada juga upaya untuk mempercepat penurunan *stunting* melalui intervensi gizi yang ditargetkan dan intervensi gizi yang responsif (As-syifa et al., 2023). Ibu-ibu PKK terlibat dalam beberapa program, yang mencakup inisiatif kesehatan seperti administrasi rumah tangga, pelestarian lingkungan, dan penyusunan strategi yang baik untuk kesejahteraan. Keberhasilan program ini terletak pada pendekatan komprehensif terhadap pemantauan dan promosi pertumbuhan, yang mencakup sisi permintaan (balita dan ibu balita), sisi dukungan (kader ibu PKK, petugas kesehatan, dan masyarakat), dan sisi kebijakan (Dinas Kesehatan). Pengetahuan dan keterampilan kader dalam pencegahan *stunting* masih kurang dalam mengatasi masalah *stunting* di Desa Pesanggrahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi PKK untuk berkontribusi secara aktif dalam mengurangi prevalensi *stunting* untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan anggotanya dalam mencegah *stunting* di desa Pesanggrahan.

WHO telah menetapkan sebuah tabel tinggi badan anak usia yang dicantumkan dalam indeks TB/U dengan disertai beberapa skor seperti berikut :

- Anak dengan TB/U < -3 SD masuk dalam dalam kategori sangat pendek (*Severely stunted*).
- Anak dengan TB/U -3 SD ≤ -2 SD masuk dalam kategori pendek (*stunted*).
- Anak dengan TB/U -2 SD - $+3$ SD masuk dalam kategori normal.
- Sedangkan anak dengan TB/U $+3$ masuk dalam kategori tinggi.

Dengan adanya data tinggi badan anak berdasarkan usia yang disebutkan di atas, ada kemungkinan beberapa orang masih mengalami kesulitan dalam menentukan kategori spesifik yang dimiliki anak mereka. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2021 memberikan tabel standar tinggi badan anak berdasarkan usia dari 1 hingga 5 tahun.

Tabel 1 Standart Badan Anak Menurut Usia

Usia	Rata Rata Tinggi Badan Anak Laki - laki	Rata Rata Tinggi Badan Anak Perempuan
1 Tahun	71,7 cm	67,8 cm
2 Tahun	81,5 cm	72,9 cm
3 Tahun	89 cm	87, 8 cm
4 Tahun	95,8 cm	95 cm
5 Tahun	102 cm	101,1 cm

Sumber (Ruangmom, 2022).

Pengurangan *stunting* dapat dicapai dengan penerapan kebiasaan sehat yang didasari oleh pengetahuan pribadi dalam keluarga. Ibu-ibu PKK secara aktif mendukung tren ini dengan terlibat dalam upaya sosialisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi penerapan PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Mempromosikan penerapan praktik-praktik PHBS di rumah tangga, terutama di kalangan ibu-ibu PKK, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi masalah kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Selain itu, inisiatif PHBS meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan dengan mempromosikan latihan fisik secara teratur, kebiasaan makan bergizi, sanitasi yang memadai, dan kebersihan tangan yang baik, sehingga mencegah anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan. Jenis latihan fisik ini mengacu pada tugas-tugas rumah tangga yang melibatkan gerakan fisik dan tenaga, biasanya dilakukan oleh anggota keluarga.

Gizi yang tidak memadai adalah salah satu faktor penyebab *stunting* pada balita. Anak kecil, seringkali mereka yang berusia di bawah lima tahun, sering kali tidak mendapatkan asupan makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Wanita hamil harus memastikan asupan suplemen hematopoietik yang cukup dan mengonsumsi susu yang diperkaya dengan asam folat untuk mengurangi kemungkinan pertumbuhan yang terhambat pada keturunan mereka. Sangat penting untuk memberikan ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama dan kemudian memperkenalkan makanan pendamping ASI yang bergizi hingga anak mencapai usia dua tahun (Wandini et al., 2020). Selain itu, faktor lain yang memengaruhi terjadinya *stunting* adalah kemampuan praktisi kesehatan dalam mendeteksi kasus secara dini, kebersihan air dan lingkungan sekitar, praktik pengasuhan anak, lokasi persalinan, dan warisan genetik (Nirmalasari, 2020).

Angka terbaru menunjukkan bahwa dusun tersebut telah mencapai rekor tertinggi angka *stunting*, dengan 152 kasus. Hal ini menjadikan Kecamatan Kwanyar sebagai kecamatan dengan prevalensi malnutrisi tertinggi di Kabupaten Bangkalan, di mana angka *stunting* secara keseluruhan mencapai 43,21%. Sumber informasi ini adalah penelitian Azmy dan Mundiastuti yang dilakukan pada tahun 2018. Di era

modern, orang-orang dari semua kelompok usia sering kali asyik dengan perangkat elektronik, yang mengakibatkan penurunan aktivitas fisik. Menolak anak yang mengalami *stunting* dianggap tidak diinginkan secara sosial, meskipun faktanya banyak perempuan yang menderita *stunting* karena penyebab seperti malnutrisi, sanitasi yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan. Akibat pandemi COVID-19, prevalensi *stunting* di Bangkalan meningkat di tahun 2021, mencapai 38,9%. Angka ini melebihi tingkat target *stunting* yang ditetapkan untuk Indonesia (Novianti, 2018), yang mengindikasikan adanya peningkatan yang cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan adalah 954.801 jiwa, yang tinggal di wilayah seluas 1.001,44 km². Kabupaten ini dibagi lagi menjadi 18 kecamatan dan 281 desa/kelurahan. Madura diklasifikasikan sebagai daerah yang kurang berkembang dan terbelakang. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangkalan, hal ini masih menjadi perhatian di beberapa daerah tertentu di wilayah tersebut. Rencana pembangunan Kabupaten Bangkalan secara eksplisit mengamanatkan penurunan angka *stunting* menjadi kurang dari 14% pada tahun 2024.

Ibu-ibu PKK dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam upaya promosi, mengambil peran sebagai pendorong, motivator, dan penyuluh masyarakat, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat tentang *stunting*. Korelasi antara prevalensi masalah pemberian makan anak di suatu wilayah dan keterlibatan ibu-ibu PKK sebagai aktivis adalah signifikan. Kehadiran ibu-ibu PKK sangat penting dan secara taktis menguntungkan, karena layanan yang mereka tawarkan dapat menarik simpati dari masyarakat (Siswanti et al., 2022). Ibu-ibu PKK dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif promotif dan preventif serta memiliki kemampuan untuk mengambil peran sebagai pemimpin, motivator, dan pendidik masyarakat. Ibu-ibu PKK berperan sebagai partisipan aktif yang berkolaborasi dalam pelaksanaan berbagai inisiatif sukarela, seperti terlibat dalam sektor kesehatan untuk mengurangi prevalensi *stunting* di kalangan anak-anak. Selain itu, mereka juga menyebarkan pengetahuan terkait kesehatan kepada para ibu yang memiliki balita dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat (Laswati, 2019). *Stunting* pada balita menyebabkan beberapa dampak negatif seperti tingginya angka kesakitan dan kematian, gangguan tumbuh kembang anak dan berkurangnya kemampuan belajar, meningkatnya kerentanan terhadap infeksi dan penyakit kronis di masa dewasa, serta berkurangnya produktivitas dan potensi ekonomi (Widyastuti et al., 2022). Di tahun 2021 terdapat 38,9 % Nilai tersebut tinggi dan melebihi batas target tingkat *stunting* di Indonesia, maka dari hal tersebut berarti masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama ibu balita yang masih tabu belum mengetahui bahwasanya anaknya terkena *stunting* pada Kabupaten Bangkalan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Apakah Peran Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga berpengaruh positif menurunkan laju pada *stunting* Dusun Pessanggrahan, Bangkalan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui apakah peran Ibu PKK berpengaruh positif dalam menurunkan laju *stunting* pada Dusun Pessanggrahan, Bangkalan?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat memberikan wawasan pemahaman mengenai *stunting*